

BAB 13

DOSA BESAR PENDIDIKAN

1. MODERNISASI

- a. APA ITU MODERNISASI
- b. PENGERTIAN MODERNISASI
- c. DAMPAK POSITIF MODERNISASI

2. DOSA BESAR PENDIDIKAN

- a. INTOLERANSI.
- b. PERUNDUNGAN
- c. KEKERASAN SEKSUAL
- d. EMPATI

BAB 14

GERAKAN KERJA SAMA DAN Instrumen nasional dan internasional pencegahan korupsi

1

1. Gerakan dan Kerja Sama Nasional dan Internasional Pencegahan Korupsi

2. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi

3 Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

4. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional

5. Lembaga Pencegahan Korupsi

6. Pencegahan Korupsi Belajar Dari Negara Lain.

Modernisasi

- ▶ **Apa itu modernisasi?**
- ▶ **Kata modernisasi berasal dari kata dasar modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modern adalah terbaru atau mutakhir. Bisa juga diartikan sikap dan cara berfikir sesuai dengan tuntutan zaman.**

Berarti, modernisasi adalah proses berfikir manusia untuk perkembangan kehidupan yang modern.

- ▶ **Salah satu unsur penting modernisasi adalah adanya perubahan dari cara pandang tradisional atau penggunaan benda-benda tradisional ke yang lebih modern.**

MODERNISASI

Kata modernisasi berasal dari bahasa latin, modernus yang digabungkan dari dua kata, yaitu Kata modo bermakna akhir-akhir ini, dan ernus yang menjelaskan periode waktu masa kini.

Jadi Modernisasi adalah proses yang di tempuh untuk sampai pada pereode waktu masa kini.

Modernisasi juga berkaitan dengan perubahan sosial, sehingga membuat sejarah peradaban umam manusia .

Modernisasi merupakan pola peradaban dari tradisional menjadi modern, untuk mendapatkan cara prkatis dan efisien

Beberapa pengertian menurut para ahli

- ▶ 1. Wilbert E. Moore Modernisasi adalah transformasi total kehidupan Bersama yang tradisional dalam arti teknologi, organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomi dan politik , sehingga menandai negara –negara barat yang stabil .
- 2. Astrid S. Susanto, Modernisasi merupakan proses pembangunan yang di berikan oleh perubahan demi kemajuan.
- ▶ 3. Koentjaraningrat Modernisasi merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan dengan zaman dan konsultasi dunia
- ▶ 4. Soerjono Soekanto Modernisasi adalah perubahan sosial yang biasanya terarah berdasarkan satu perencanaan (sosial planning)

Dampak Positif dari Modernisasi

Kesehatan

Teknologi membuat kemajuan dalam bidang penyediaan dan pelayanan jasa.

- 1 Kehadiran teknologi menjadikan rumah alat kesehatan, industri kesehatan, dan pelayanan semakin mudah diakses.

Transportasi

- 2 Kemajuan teknologi membuat fasilitas umum seperti transportasi semakin terjangkau dan nyaman. Contohnya bus, taksi, kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang.

-



Dampak Positif dari Modernisasi

Politik

3

Mudahnya akses informasi dari gawai dapat meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Selain itu, masyarakat akan mendapat kesadaran untuk mengikuti pemilu dan aspirasi, dengan adanya teknologi. Teknologi juga mempermudah kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi dan politik.

2

4

Sosial Budaya Dalam lingkup sosial budaya, kehadiran teknologi dapat mengubah taraf pendidikan, untuk mengembangkan potensi seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Akses pendidikan yang mudah dijangkau lewat teknologi, juga bisa melahirkan generasi pendidik lebih terlatih dan disiplin, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia lebih baik.



Dampak negative Modernisasi

1

Sosial Budaya Terjadi kesenjangan sosial karena sebagian masyarakat dapat mengikuti modernisasi, sedangkan masyarakat yang lain susah berkembang. Kesenjangan ini membuat beberapa orang tidak bisa menikmati fasilitas, mendapat penghasilan rendah, dan kesulitan mendapatkan penghargaan.

- ▶ Zaman serba modern ini membuat perubahan sosialisasi. Contohnya pemakaian internet membuat seseorang lebih asyik berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya. Meski teknologi berdampak baik, tetapi mendorong seseorang lebih individualis.

▶ 2

- ▶ Ekonomi Banyak pengangguran di masyarakat karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di lowongan pekerjaan. Tenaga kerja bisa digantikan dengan mesin yang lebih modern. Adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi.

3. Transportasi Banyaknya kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan dan pencemaran udara Meningkatnya kecelakaan lalu lintas

4. Kesehatan Munculnya penyakit baru karena produk teknologi Pencemaran lingkungan karena limbah di bidang kesehatan, bisa berbahaya bagi makhluk hidup

DOSA BESAR PENDIDIKAN

Menyambut Inonesia ke 76 tahun, Indonesia masih mengalami kemunduran dalam hal moral, modernisasi seharusnya membawa dampak yang positif bagi perkembangan Indonesia. Khususnya Dunia Pendidikan mengalami krisis moral.

Peran antara guru, murid dan orang tua belum maksimal saling mendukung. Ini akan mengganggu Pendidikan nasional yang sedang berlangsung, yaitu stabilitas Pendidikan siswa disekolah, tumbuh kembang anak secara intelektual, emosional, Spepiritual, dan Emosional termasuk mengharapkan terwujudnya generasi cerdas.

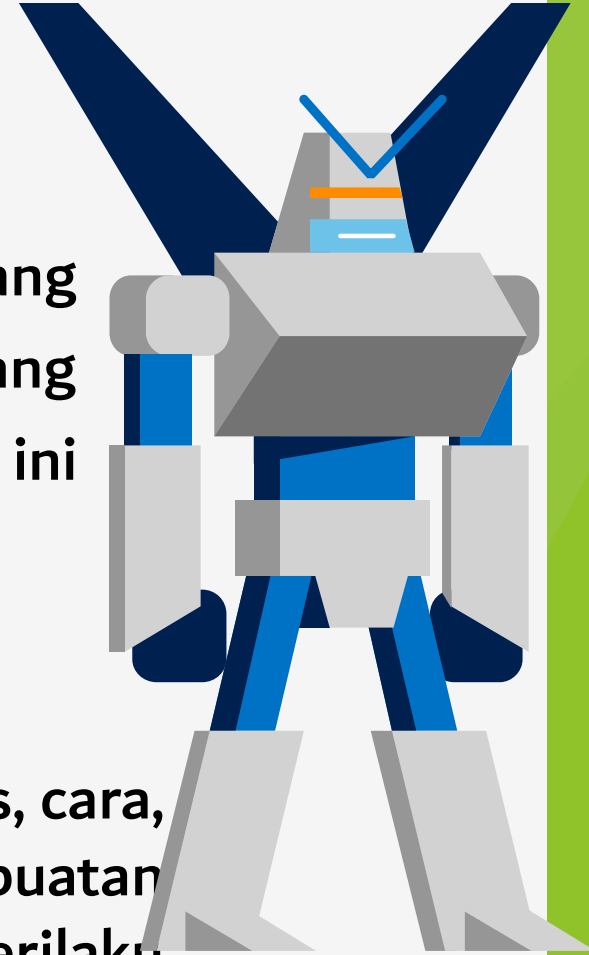
1 DOSA BESAR PENDIDIKAN

1 INTOLERANSI

Menurut KBBI, intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa, di mana, keadaan seperti ini dapat diartikan sebagai sikap yang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Terkhusus yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, kasus-kasus intoleransi ini lebih mengarah kepada ihwal keagamaan.

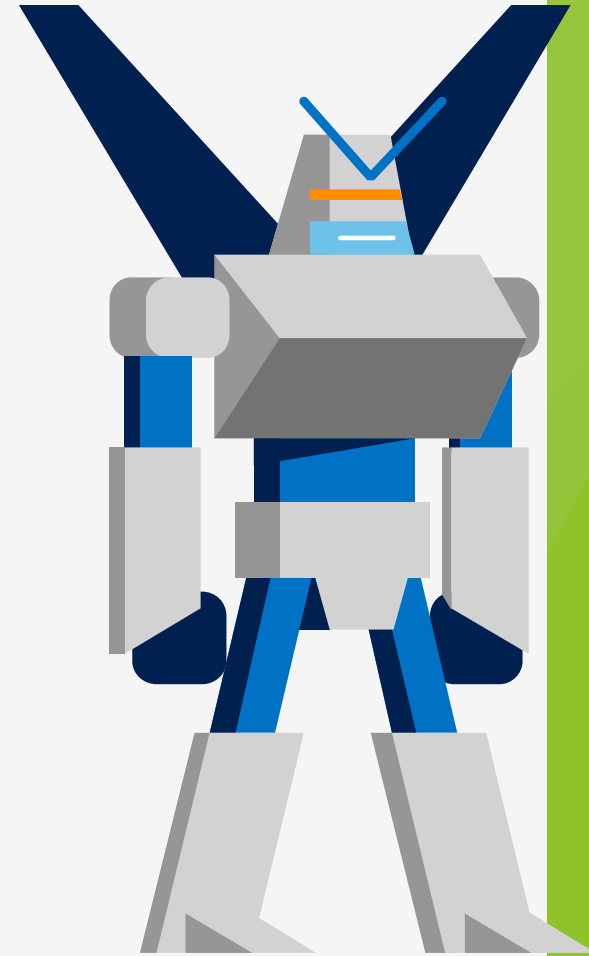
2 PERUNDUNGAN / BULLYING

Berdasarkan KBBI, perundungan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan merundung. Di mana, merundung merupakan perbuatan yang mengganggu, mengusik secara terus-menerus, hingga perilaku yang menyusahkan seseorang.



DOSA BESAR PENDIDIKAN

- 3 **Kekerasan Seksual**
Kekerasan atau *violence* menjadi warna kelam yang menyelimuti dunia pendidikan Ibu Pertiwi. Aksi kekerasan (KBBI) merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain



PENYEBAB INTOLERANSI DI SEKOLAH

1

Kurangnya Kemampuan rasa empati

Kemampuan empati internal dan eksternal yang perlu ditingkatkan oleh siswa dan guru-guru kita

2

2

FAKTOR EKONOMI

persepsi keterancaman yang tinggi, terutama terkait dengan faktor ekonomi

3

Radikalisme

pandangan islam ekstrim pada beberapa guru kita. Untuk itu, kemampuan berpikir kritis dan reflektif perlu

2

4

faktor sosial dan ekonomi.

Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yunita Faela Nisa menuturkan, bahwa peran Pendidikan agama perlu di tingkatkan

Memutus INTOLERANSI DI SEKOLAH

- 1 Menanamkan nilai – nilai toleransi, keberagaman, dan cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan harus ditanamkan kepada siswa dan tenaga pengajar untuk mengubah cara pandang mereka terhadap keberagaman.
- 2 Pembentukan organisasi dalam sekolah yang mewakili kelompok agama tertentu seperti rohis, harus siap menerima segala keterbukaan. .
- 3 Kebijakan yang dikeluarkan haruslah mementingkan semua pihak, bukan hanya mementingkan kelompok tertentu saja.
- 3 Peran media informasi di sekolah seperti majalah dinding (mading) harus lah diawasi agar tidak memuat konten yang intoleran.

EMPATI

Menurut M.Umar dan Ahmad ALI

Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut.

Patton

- ▶ Menjalin sebuah relasi yang akrab, hingga bisa memahami perasaan orang lain membutuhkan waktu dan proses. Meskipun tidak mudah, seseorang harus melakukannya demi memiliki rasa kasih dan memperhatikan orang yang dituju. “Memposisikan diri pada posisi orang lain.”

CIRI CIRI EMPATI

► Ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada diri orang yang memiliki tingkat empati tinggi, yaitu:

1. Memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap orang lain
2. Merupakan pendengar yang baik
3. Memahami perasaan orang lain dengan baik
4. Sering menjadi tempat curhat orang lain
5. Sering memikirkan perasaan orang lain
6. Sering diminta menjadi penasihat bagi masalah orang lain
7. Sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis
8. Selalu mencoba membantu orang lain yang kesusahan
9. Mudah mengetahui ketika seseorang berkata tidak jujur
10. Terkadang merasa lelah atau kewalahan ketika berada dalam situasi sosial

Menumbuhkan rasa empati

- 1 Perbanyaklah bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda
- 2 Perhatikanlah bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal, misalnya mimik muka, saat berkomunikasi dengan orang lain.
- 3 Berusahalah untuk mendengarkan cerita orang lain sebaik mungkin tanpa menyela
- 4 Cobalah untuk memahami orang lain walau sebenarnya tidak setuju atau tidak sependapat dengannya.
- 5 Sering-seringlah menempatkan diri Anda pada posisi orang lain.

PPKS (PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL)

1. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) merupakan terobosan yang melindungi korban.
- ▶ Merujuk pasal 5, yang termasuk tindak kekerasan seksual adalah verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Merujuk pasal 10 hingga pasal 19, Menteri Nadiem mengajak sivitas akademika agar berperan aktif melindungi korban. “Pendampingan yang dimaksud mencakup konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.

PERAN PEMERINTAH

- ▶ **Undang-undang** Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (**UU TPKS**). Tanda tangan tersebut dilakukan Jokowi di Jakarta pada Senin, 9 Mei 2022. Dengan demikian, **UU TPKS** resmi **berlaku** sejak tanggal diundangkan

TEIMA KASIH SELAMAT BELAJAR

BAB 14

GERAKAN KERJA SAMA DAN Instrumen nasional dan internasional pencegahan korupsi

1

1. Gerakan dan Kerja Sama Nasional dan Internasional Pencegahan Korupsi

2. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi

3 Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

4. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional

5. Lembaga Pencegahan Korupsi

6. Pencegahan Korupsi Belajar Dari Negara Lain.

Gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh Lembaga lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab negara untuk memberantas korupsi dalam birokrasi Pemerintahan.

Gerakan anti korupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensi nya masing-masing. Yang ditujukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku antikorupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan.



GERAKAN DAN KERJA SAMA NASIONAL YANG HARUS DILAKUKAN

1. SEKTOR PUBLIK/PEMERINTAH

Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan Lembaga perusahaan swasta atau komersial .

Tujuan utama Lembaga publik adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan pelayanan atau jasa, tanpa berorientasi pada keuntungan atau non profit.

Contohnya : good and clear gavernance

Salah satu penganjangan Gerakan anti korupsi, intruksi presiden no 12 tahun 2016 tentang Gerakan nasional revolusi mental. Tujuannya memperbaiki karakter bangsa Indonesia dengan memacu pada nilai-nilai integritas (jujur, Bertanggung jawab, disiplin), etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Secara umum Intruksi presiden ini di fakuskan:

- 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.**
- 2. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur pemerintah dan Penegak Hukum.**
- 3. Penyempurnaan Standar pelayanandan system pelayanan yang inovatif**
- 4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance based manajemen system*) dan Aparatur sipil Negara**
- 5. Peningkatan perilaku pelayanan public yang cepat transparan, akuntabel dan responsif.**
- 6. Penyempurnaan peraturan per undang-undangan (regulasi)**
- 7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi.**

Secara khusus di berikan kepada Menteri koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang mewujudkan perilaku masyarakat yang tertib difokuskan:

- 1. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang public.**
- 2. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan**
- 3. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan.**
- 4. Peningkatan perilaku tertib berlalu lintas.**
- 5. Peningkatan perilaku antri.**
- 6. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib.**
- 7. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib.**
- 8. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan Pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.**

- ▶
- ▶ **Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan GNRM. Yang anggota nya terdiri unsur Menteri atau Lembaga, dunia tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi dan akademisi.**
- ▶
- ▶ **Tujuannya adalah sebagai acuan masyarakat untuk melaksanakan GNRM bagi penyelenggara negara, dunia usaha, dunia Pendidikan, masyarakat dan dibuat dengan tujuan agar GRNM ini bisa dilakukan secara massif dan konsisten sehingga sasaran GNRM dapat tercapai secara terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.**

- ▶ **Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No.3 tahun 2017 ada nilai strategis instrumenyal Revolusi Mental yang meliputi :**
- 1. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara Tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan.**
- ▶ **2. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri kas keyakinan seorang atau masyarakat. Etos kerja berakitan erat dengan kepribadian, perilaku dan karakter yang bersangkutan.**
- ▶ **3. Gotong royong adalah merupakan nilai luhur yang sudah ada sejak jaman nenek moyang.**



Gambar 7.1. Pelaku GNRM
(Sumber: Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017)

KPK juga berupaya melaksanakan berbagai gerakan upaya bekerja sama dalam rangka pencegahan korupsi disektor publik. Sektor perijinan, Pendidikan, Kesehatan, sumber daya alam, sector pangan dan banyak lagi.

Gerakan lain juga di lingkup departemen atau Lembaga pemerintah adalah penanda tangan Pakta integritas (Pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, wewenag dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, di lingkup departemen atau Lembaga pemerintahan.

2. Sektor Swasta dan BUMN

Sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan korupsi di sektor swasta utamanya melalui perbaikan sistem dan tatakelola

Salah satu yang diinisiasi KPK tahun 2016 yaitu Gerakan pembangunan integritas bisnis. Merupakan kolaborasi multisektoral yang melibatkan Ditjen Bea cukai, ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, kementerian kehutanan, lingkungan hidup, SKK migas, Kementerian pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN.

3. Gerakan dan Kerjasama Masyarakat

ada beberapa model berdasarkan pelaku Gerakan antikorupsi di Indonesia:

- a. Lembaga Pendidikan dan pusat studi anti korupsi**
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat antikorupsi**
- c. Komunitas komunitas antikorupsi**

Beberapa contoh komunitas anti korupsi

- 1) saya perempuan anti korupsi (SPAK)**
- 2) Future Leader for anti corruption (FLAC) (dibentuk oleh MHS)**
- 3) Ikatan guru Indonesia: Satu guru penggerak Integritas (sagupegas),**
- 4) Forum taman bacaan Masyarakat, taman literasi integritas.**
- 5. Pusat belajar anti korupsi (PBAK) dompet dhuafa**
- 6. Komunitas obat manjur (orang hebat berani jujur).**
- 7. Gerakan anti korupsi lintas alumni PT.**

GERAKAN ANTI KORUPSI INTERNASIONAL

32

A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (UNITED NATIONS)

Setiap lima tahun secara regular PBB (United Nations) menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau United Nation Congress on prevention on crame and treatment of Offendres
Konggres ke 13 yang diselenggarakan di doha Qatar.

Kongres ke 10 diadakan 10-17 April 2000 di vienna (Austria) mengangkat isu mengenai korupsi

Cara yang efektif untuk memberantas korupsi

- a. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah (strong Political will)**
- b. Antara keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.**
- c. Pemberdayaan masyarakat sipil.**
- d. Adanya media yang bebas dan independent yang dapat memberikan akses pada public.**

2. Bank Dunia

3. OECD (Organisation for Economic co – Operation and Development) tujuannya adalah membuat instrument untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dan transaksi bisnis Internasional.

- **4. Masyarakat Uni Eropa (1996)**
-

▶ **2. INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI NASIONAL**

▶ **DAN INTERNASIONAL**

A. INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI NASIONAL

- 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.**
- 2. Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana anti korupsi dan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tentang tindak pidana korupsi. Dalam kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis tindak pidana (delik) korupsi beserta sanksi yang diberikan kepada pelakunya.**

- ▶ **3. Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- ▶ **4. Undang-Undang No 46 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**
- ▶ **5. Undang Undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pecuncian Uang.**
- 6. Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara.**

B. INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI INTERNASIONAL

1. United nations Covention against corruption (UNCAC)

**UNCAC sudah di tantangani 130 diratifikasi 183 negara.
yang diatur dalam kovensi ini adalah:**

- a. Masalah pencegahan lewat peradilan
hal yang sangat penting mempertimbangkan sektor public amupun
sektor privat (swasta).**
- b. Kriminalisasi
Kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang
dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk
pengembangan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan
hukuman (pidana) untuk tindak pidana korupsi.**
- c. Kerja sama internasional.**
- d. Pengembalian asset hasil korupsi
Kerjasam internasional untuk mengembalikan asset – asset yang
dilarikan ke negara lain di kembalikan ke negara asal.**

- ▶ **ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL ANTIKORUPSI BAGI INDONESIA**
- ▶ **Ratifikasi Konvensi Antikorupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut yaitu :**
 - ▶ **1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.**
 - ▶ **2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.**

- 3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.**
- 4. Mendorong terjalannya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral**
- 5. perlunya harmonisasi peraturan perundang-perundang nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.**

2. Convention on Bribery of Foreign Public Official IN International Business Transaction

Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

4. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (INTERNASIONAL NGOS):

1. Tranparasi Internasional (IT)

adalah Lembaga internasional non pemerintah yang memantau dan membulikasikan hasil hasil penelitian mengenai korupsi dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional.

2. Integrity Action

Integrity Action waktu itu di kenal dengan TIRI (Making integrity work) Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa denfa pengembangan Intregritas kesempatan besar untukmemperbaiki dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan tercapai.

5. LEMBAGA PENCEGAHAN KORUPS:

Selain peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan ada beberapa lembaga atau instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dan perilaku korupsi :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Merupakan badan independen dasar hukumnya No30 tahun 2002 Tentang Komics Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

2. Komisi Yudisial

3. Ombusdman Republik Indonesia

4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

5. Lembaga Pengawas Perbankan: (OJK)

6. Komisi Penyiaran Indonesia.

7. Komics Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum

6. PENCEGAHAN KORUPSI BELAJAR DARI NEGARA LAIN

Negara yang bisa di contoh dalam pemembrantasan korupsi tahun 2005

- a. India
- b. Hongkong

Ada Beberapa hal yang meyebabkan korupsi sulit untuk di berantas :

- 1. Kebutuhan dan keserakahan.**
- 2. Materi hukum, Perundang-undangan, regulasi atau kebijaksanaan cenderung berpotensi korupsi.**
- 3. Minimnya *role models*.**
- 4. Kurangnya Langkah-Langkah kongkrit pemberantasan korupsi.**
- 5. lambatnya penanganan para koruptor.**
- 6. Perilaku social yang toleran terhadap para koruptor**

**THANK YOU / terima kasih
selamat belajar sukses selalu**

**SUMBER BUKU : PENDIDIKAN KORUPSI UNTUK
PERGURUAN TINGGI EDISIS REVISI**